

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Z. 2013. *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 4). Jakarta: Sinar Grafika.
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. 2011. *Ringkasan Eksekutif Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Srandakan 2012-2032*. Tidak diterbitkan.
- Fischel, W.A. 1985, *The Economics of Zoning Laws: A Property Rights Approach to American Land Use Controls*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Harsono, B. 1999. *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Cet. 8). Jakarta: Djambatan.
- Hasni (Ed.). 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Jacobus, C.J. 2010. *Real Estate Principles* (Eleventh Edition). Mason (Ohio, USA): Cengage Learning.
- Mertokusumo, S. 2007. *Mengenal Hukum* (Cet. 3). Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, S. 2006. *Ilmu Hukum* (Cet. 6). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sodiki, A. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soekanto, S. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Sumardjono, M.S.W., dkk. 2011. *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM dan Gadjah Mada University Press.
- Sutaryono. 2007. *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*. Yogyakarta: TuguJogjaGrafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya,
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. ENSIKLOPEDIA

Fischel, W.A. 2000. "Zoning and land use regulation", dalam *Encyclopedia of Law and Economics*: 405.

D. SKRIPSI DAN PENELITIAN

Pragusta, D.G. 2011. Eksistensi Hak Menumpang Di Atas Sultan Grond Setelah Berlakunya UUPA di Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta. Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: tidak diterbitkan.

Sudjito. 1994. Perkembangan Hukum Tanah Kasultanan Yogyakarta. Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: tidak diterbitkan.

Sulastriyono. 2000. Potensi Konflik Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pasir Pantai di Pesisir Pandansimo DIY serta Upaya Penanggulangannya. Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: tidak diterbitkan.

Wibowo, D.A. 2010. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Sultan
Grond Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Gadjah Mada: tidak diterbitkan.

E. ARTIKEL JURNAL

Anggraeni, T.D. “Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional dalam Urusan
Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Rechtsvinding 1* (1),
2012.

Ismail, N. “Menempatkan Realitas Pertanahan Lokal dalam RUU
Keistimewaan DIY”. *Mimbar Hukum II* (43), 2003.

Nurmaidia A, dkk. “Tatanan Permukiman Pesisir; Adaptasi Terhadap
Lingkungan Fisik dan Kondisi Alam di Kepulauan (Studi Kasus: Pulau Lae-
Lae)”. *Jurnal Prosiding 7*, 2013.

F. MAKALAH

Direktorat Jenderal Penataan Ruang, “Peraturan Zonasi sebagai Perangkat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang”, 2007.

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, “Tinjauan Aspek Penataan
Ruang dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir”, *Seminar Umum Dies
Natalis ITS ke-43*, Surabaya, 8 Oktober 2003.

G. KORAN

Rudiana, Pito Agustin. “Kemendagri Tolak Pembentukan Dua Badan Keistimewaan DIY”, *Koran Tempo*, 10 Juni 2015.

H. INTERNET

Badan Informasi Geospasial. “PP No 8 Tahun 2013 Sebagai Acuan Peta Rencana Tata Ruang”. <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/pp-no-8-tahun-2013-sebagai-acuan-peta-rencana-tata-ruang>, diakses pada tanggal 2 Maret 2015.

Hukumonline.com, “Putusan MK Tegaskan Hak Konstitusional Nelayan”. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dfb6eee04a51/putusan-mk-tegaskan-hak-konstitusional-nelayan>, diakses pada tanggal 4 April 2015.

Kedaulatan Rakyat, “Puluhan Tambak Udang Akhirnya Ditutup”, <http://krjogja.com/read/243190/puluhan-tambak-udang-akhirnya-ditutup.kr>, diakses pada tanggal 1 Juli 2015.

Tribun Jogja, “Pemda DIY Bakal Legalkan Tambak Udang”, <http://jogja.tribunnews.com/2015/05/26/pemda-diy-bakal-legalkan-tambak-udang>, diakses tanggal 1 Juli 2015.

Mongabay Indonesia. “Pentingnya Peta untuk Perencanaan Tata Ruang dan Tata Kelola Hutan”. <http://www.mongabay.co.id/pentingnya-peta-untuk-perencanaan-tata-ruang-dan-tata-kelola-hutan/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2015.

Prasaja, H. “Mahkamah Konstitusi Sebut HP3 Inkonstitusional, Judicial Review Dikabulkan”. <http://www.spi.or.id/?p=3786>, diakses pada tanggal 4 April 2015.

Sumadi, “Pertanahan DIY Tahun 1960, Tahun 1984 dan Tahun 1985”, http://birohukum.jogjaprovo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=451:pengaturan-pertanahan-diy-tahun-1960-1984-1985&catid=107:provinsidiy&Itemid=532, diakses pada tanggal 15 Mei 2015.